

Pansus LHP Sampaikan 13 Rekomendasi

Temuan BPK Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti

PONTIANAK. Sebanyak 13 rekomendasi disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalbar terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kalbar atas laporan keuangan pemerintah provinsi Kalbar tahun anggaran 2010. Laporan itu disampaikan langsung dalam sidang paripurna di Balai Rung Sari DPRD Kalbar, Rabu (21/9).

"Kita memberikan 13 rekomendasi kepada gubernur untuk segera ditindaklanjuti. Apalagi masih ada beberapa temuan BPK belum ditindaklanjuti pemerintah provinsi," kata Ketua Pan-

sus, Tony Kurniawan, kepada Equator di ruang kerjanya, kemarin.

Dia menjelaskan, dari hasil rapat gabungan antara pansus DPRD dengan tim eksekutif 63,64 persen temuan pada sistem pengendalian intern yang sudah ditindaklanjuti, dan untuk kepatuhan yang telah selesai 88,24 persen dari keseluruhan tindak lanjut yang wajib diselesaikan.

Tony memaparkan, sistem pengendalian intern sesuai LHP No. 26.B / HP / XIX.PNK / 05 / 2011 tanggal 17 Mei

■ Halaman 7

Temuan yang ditindaklanjuti

- Sistem Pengendalian Intern, sesuai LHP No. 26.B/HP/XIX.PNK/05/2011 tanggal 17 Mei 2011 terdapat 11 temuan. Dari 11 temuan terdapat 24 rekomendasi dan 33 keluaran. Tindaklanjuti yang telah dilakukan 21 dan yang belum 12. Pemerintah Provinsi telah menyelesaikan 63,64 persen dari keseluruhan tindak lanjut yang wajib diselesaikan.
- Kepatuhan sesuai LHP No 26.C/HP/XIX.PNK/05/2011 tanggal 17 Mei 2011 terdapat 9 temuan. Dari 9 temuan terdapat 24 rekomendasi dan 34 keluaran. Tindaklanjuti yang telah dilakukan 30 dan yang belum 4. Pemerintah Provinsi telah menyelesaikan 88,24 persen dari keseluruhan tindak lanjut yang wajib diselesaikan.

Sumber: Laporan Pansus LHP DPRD Kalbar

Pansus LHP dari halaman 1

2011, BPK telah melaksanakan pengujian atas sistem Pengendalian Intern pemerintah provinsi Kalbar. BPK RI Perwakilan Kalbar telah menemukan dan mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern yang diketahui ada 11 temuan.

Temuan itu, pengelolaan keuangan daerah oleh bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah belum memadai. Penyajian Saldo Piutang pajak sebesar Rp 13.731.128.500 tidak andal. Penyajian saldo persediaan obat pada rumah sakit khusus provinsi Kalbar sebesar Rp 410.848.247,07 tidak andal.

Kemudian, penyajian saldo penyertaan modal pemerintah provinsi Kalbar pada PDAM provinsi per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.000.000.000 tidak andal. Pengelolaan barang milik daerah belum memadai dan penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.112.224.096.841,75 juga tidak andal.

Selanjutnya, penyajian saldo tagihan piutang penjualan angsuran sebesar Rp 3.123.402.658 dan saldo bagian lancar tagihan piutang angsuran sebesar Rp. 0,00 juga tidak andal. Penyajian Saldo Kemitraan Pihak ketiga sebesar Rp. 95.383.000 tidak andal. Penyajian saldo asset lain-lain per 31 Desember 2010 sebesar Rp 74.345.453.842,59

tidak andal.

BPK juga menemukan penyajian anggaran dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 35.590.439.887,38 dan belanja daerah minimal sebesar Rp 83.938.669.106 tidak sesuai standar akuntansi pemerintah. Penyajian realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp 4.054.320.344,29 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso tidak wajar. Terakhir implementasi mekanisme penyaluran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.045.883.187 tidak sesuai ketentuan.

Mengenai laporan atas kepatuhan sesuai LHP No 26.C/HP/XIX.PNK/05/2011 tanggal 17 Mei 2011, Tony melanjutkan, BPK RI Perwakilan Kalbar telah melaksanakan pengujian atas Kepatuhan dan menemukan 9 kasus.

Pertama, dijelaskan dia, soal pengelolaan keuangan daerah oleh bendaharawan penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu pada empat SKPD belum memadai dan berpotensi disalahgunakan minimal sebesar Rp 779.638.901.

Selanjutnya, terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 91.200.000. Penyajian

saldo tuntutan ganti rugi daerah sebesar Rp 159.576.137, dan tunggakan UYHD sebesar Rp 6.864.329.658 tidak didukung Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau SK Pembebanan.

BPK juga menemukan pekerjaan pemeliharaan empat paket pekerjaan belanja modal jalan sebesar Rp 25.676.350.000 belum dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. Penyelesaian empat paket pekerjaan pada empat SKPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp.318.301.450.

Kemudian terdapat penerimaan tahun anggaran 2010 sebesar minimal Rp 8.894.190.005,70 tidak melalui mekanisme APBD. Pertanggungjawaban realisasi belanja barang sebesar Rp 2.540.273.250 tidak akurat. Realisasi belanja modal pada Dinas PU sebesar Rp 64.307.439.100 tidak berdasarkan Musrenbang. Dan terakhir realisasi belanja hibah sebesar Rp 3.116.832.000, dan bantuan sosial sebesar Rp 210.000.000 tidak sesuai ketentuan.

Belum lagi, Tony menambahkan hasil pemantauan atas kerugian daerah yang dilakukan BPK RI untuk mengetahui keberadaan dan pelaksanaan tugas majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). (jul)